WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa dalam penajaman sebab akibat dan penyalarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam waktu 2 (dua) tahun mendatang.
7. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2023-2024.
8. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
10. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai

dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

11. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
12. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai berikut:

a. sebagai pedoman rencana kerja bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi; dan
b. sebagai pedoman mengenai penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk mencapai tujuan dan Sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2023-2024 bertujuan sebagai berikut:

a. mempercepat pencapaian tujuan dan Sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
b. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
c. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan sehingga mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
d. menjadi panduan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tahapan dalam mencapai tujuan dan Sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

BAB III
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

a. Reformasi Birokrasi General; dan
b. Reformasi Birokrasi Tematik.

(2) Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

(3) Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.

Pasal 5

Sasaran strategis Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Pasal 6

Tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:

a. pengentasan kemiskinan;
b. peningkatan investasi;
c. digitalisasi administrasi pemerintahan;
d. percepatan prioritas aktual presiden, yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan pengendalian Inflasi.

Pasal 7

Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan selama waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Perangkat Daerah menyusun dan melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam *Road Map* yang dituangkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

Uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2023-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin.
(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun yang menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 114

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap penyelenggaraan pemerintahan, baik Pemerintah Kota Banjarmasin maupun Perangkat Daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh perangkat daerah di Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur, selain itu reformasi birokrasi juga digunakan untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust building*) kepada pemerintah serta menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional umumnya, Pembangunan Daerah khususnya.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (governance), semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan,

pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, perlu peningkatan mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional umumnya dan pembangunan Kota Banjarmasin khususnya, serta pencapaian daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB perlu peningkatan agar bisa dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Perencanaan dan pelaksanaan RB sudah dilakukan secara kolaboratif oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga perlu peningkatan fokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga untuk peningkatan RB perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2020–2024 adalah sebagai berikut :

1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional umumnya dan RB daerah khususnya yang sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui

perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.2. Tujuan Penajaman Road Map RB

Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024, yaitu :

1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

   Penajaman Road Map RB 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di Pemerintah Daerah. Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design. Melalui penajaman Road Map RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

2) Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan

   Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3) Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan

Penajaman Road Map RB 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2020–2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

1.3. Isu Strategis RB

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu- isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map RB.

1.3.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

1) Birokrasi yang Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Peran yang silo menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, komitmen pimpinan di pemerintah daerah menjadikan

SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan peningkatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Peningkatan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan penyimpangan. Kelemahan system pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Peningkatan Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Sosialisasi dan peningkatan internalisasi nilai BerAKHLAK di seluruh Perangkat Daerah, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK dapat merata pada ASN di seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.3.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan

Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Adapun total anggaran program pengentasan kemiskinan pada tahun 2022 mencapai Rp. 21.293.509.935. Adapun pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan angka kemiskinan 0,15% dari 4,89% (2021) menjadi 4,74% (2022).

Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun hal tersebut masih belum cukup untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Banjarmasin. Selain sumber daya anggaran yang besar, juga dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antar perangkat daerah untuk mencapai target yang diinginkan.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Tantangan global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pencapaian tersebut adalah dengan melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal dengan penyediaan peta potensi dan peluang usaha, melaksanakan promosi penanaman modal, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki panduan yakni Perpres Nomor 81 tahun 2020 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin pada periode 2021-2026 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini tampak pada indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2021 dan 2022, dimana indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin adalah 69,51 pada tahun 2021 dan 68,59 pada tahun 2022, dengan kategori B yang diinterpretasikan dengan predikat Cukup Baik, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.1.

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	13,35	13,28
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,37	6,40
	III. Reform	30,00	18,27	18,00
Total Komponen Pengungkit		60,00	37,99	37,68
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,01	7,98
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,64	8,53
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,33	8,29
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,55	6,11
Total Komponen Hasil		40,00	31,53	30,91
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	69,51	68,59

Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

   Penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 238 jabatan pengawas yang dialihkan ke jabatan fungsional dari 259 jabatan yang disetujui dengan 21 jabatan yang kosong, setelah melalui proses pengusulan dan pemberian pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.

2) Digitalisasi birokrasi melalui penerapan SPBE yang terintegrasi

   Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Penerapan SPBE diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik. Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2022 mendapat capaian Indeks SPBE dengan nilai 3,31 dengan kategori "Baik".

3) Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

   SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Capaian SAKIP Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2022 adalah 71,20 dengan mempertahankan predikat BB dari tahun 2018 hingga 2022.

4) Penguatan Pengawasan melalui pembangunan Zona Integritas

   Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Unit Kerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang meraih predikat WBK yaitu DPMTPSP dan Disdukcapil. Meskipun belum mencapai WBBM, diharapkan perangkat daerah mampu untuk mengembangkan pelayanan yang lebih berkualitas menuju pelayanan yang prima dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 2.1. disajikan grafik nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir.

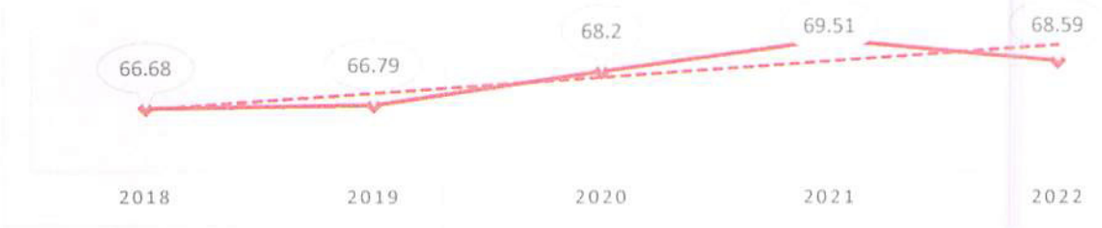

Gambar 2.1 Nilai Indeks RB Tahun 2018-2022

Berkaitan dengan capaian pembangunan daerah, pelaksanaan RB juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti : pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Kota Banjarmasin dalam sepuluh tahun terakhir sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

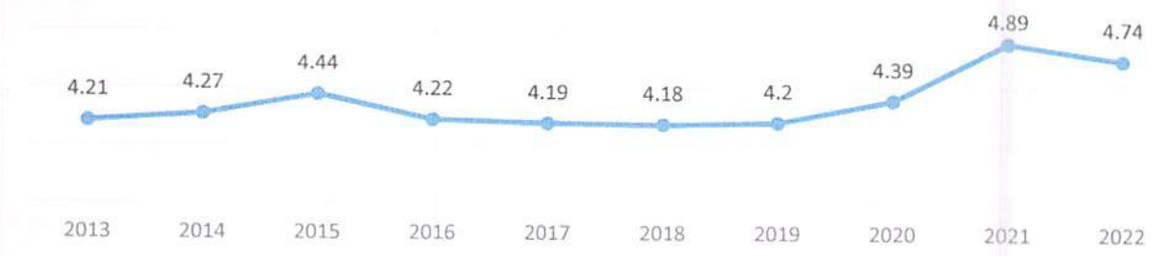

Gambar 2.2 Angka Kemiskinan dalam 10 tahun terakhir
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin

Berdasarkan data tersebut diatas, terjadinya peningkatan pada tahun 2020 hingga 2021 disebabkan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kemiskinan menjadi meningkat. Namun pada tahun 2022, Kota Banjarmasin kembali bangkit dengan terbuktinya terjadi penurunan angka kemiskinan.

Angka investasi dalam aspek PMA dan PMDN Kota Banjarmasin dalam kurun empat tahun (2019 s.d 2022), namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin yang lebih baik lagi.

Gambar 2.3 Perkembangan PMA dan PMDN Kota Banjarmasin (2019-2022)
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melihat data kemiskinan dan investasi di atas, perbaikan tata Kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi di Kota Banjarmasin.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

3.1. Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi

Fokus penajaman Road Map RB 2020–2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Daerah, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas Kota Banjarmasin.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Daerah, adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam Gambar 3.1 berikut :

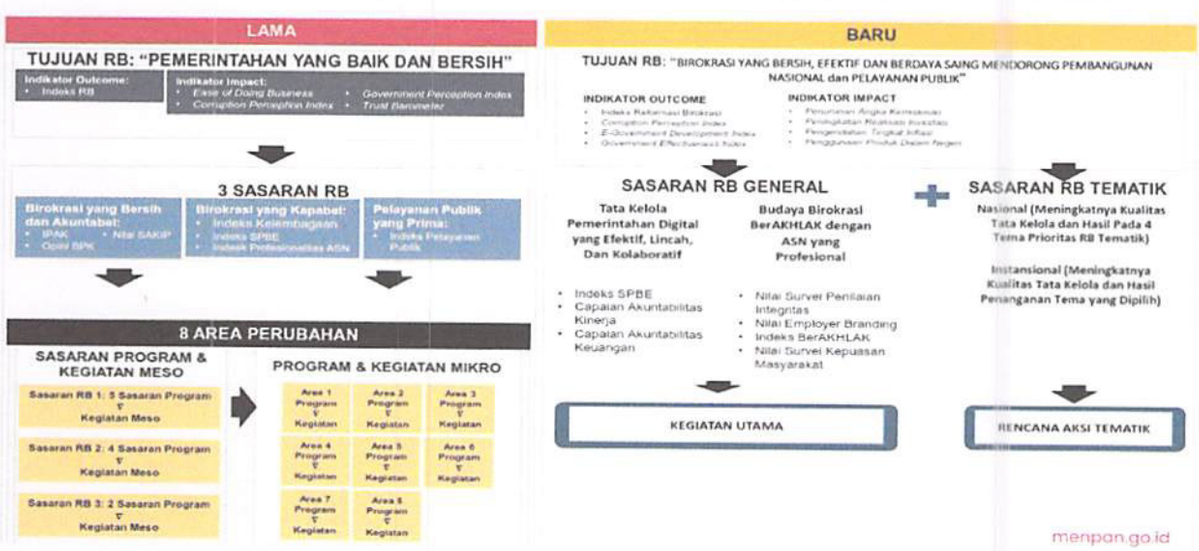

Gambar 3.1 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB
Sumber : Kemenpan RB

3.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan

kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Target Kinerja Tujuan RB

No.	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, elektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	68.59 (B)	74.00 (BB)
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan:		
		a. Angka Kemiskinan	4.74	4.32
		b. Pertumbuhan Investasi	4.84 %	2%
		c. Tingkat Inflasi	6.98	3.00-4.00
		d. Penggunaan Produk Dalam Negeri		

3.1.2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut :

1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan

tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Tabel 3.2 Target Kinerja Sasaran Strategis RB

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	3.31 (Baik)	3.30 (Baik)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja - Nilai SAKIP	71.20 (BB)	82.00 (A)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan - Opini BPK	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK	Nilai Survei *Employer Branding*	-	-

	dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	62	75 (A)(Sehat)
		Nilai Survei Penilaian Integritas	82.86	85
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	87.64	88

3.1.3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

3.1.4. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu

hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

3.1.5. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan.

Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang *rigid*. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *spesific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RB adalah sebagai berikut :

1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
2) Masih terdapat redudansi duplikasi antar komponen indikator indeks;
3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang *rigid*;
4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing pemerintah daerah menggunakan metode *self assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;

5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB.

Tabel 3.3 Penggunaan Indikator Hasil Antara Road Map RB Sebelum Penajaman dan Road Map RB Setelah Penajaman

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara dalam Road Map RB Sebelum Penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam Road Map RB 2020-2024 Setelah Penajaman
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	Sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan, untuk mengukur
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Belum tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	Indikator 5 s.d 8 sudah tersedia Indikator 9 belum tersedia	Indikator 5 dilanjutkan Indikator 6 s.d 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator 5 Indikator 9 tidak dilanjutkan
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Sistem Merit	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara dalam Road Map RB Sebelum Penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam Road Map RB 2020-2024 Setelah Penajaman
	12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN		
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator 13 sudah tersedia Indikator 14 sudah tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP (IACM) 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa 19. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indikator 15-19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14 Indikator 16 diintegrasikan dengan Indikator 15 Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan Indikator 5 Indikator 19 digantikan dengan Nilai hasil Survei Penilaian Integritas
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik 21. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 22. Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator 20-22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan Indikator 22 dilanjutkan, disempurnakan

Sumber : Kementerian PANRB

3.2. Perencanaan RB General

RB General merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital. Birokrasi digital diyakini sebagai strategi paling cepat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaftif sehingga mampu mendorong percepatan berbagai program pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan mudah, serta menekan terjadinya penyimpangan yang sangat mungkin terjadi apabila dilakukan secara manual tanpa teknologi.

Pada Kebijakan percepatan terdapat Sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif. Sembilan kebijakan tersebut yang ditetapkan menjadi strategi utama, yaitu :

1) Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*. Sasaran dari kebijakan ini adalah "Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi". Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat (*layer*) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi.
2) Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah "Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional". Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar JF lebih berorientasi kepada kinerja output yang mendukung mekanisme kerja *agile organization* yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik di dalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi.
3) Percepatan Transformasi *Squad Model*. Sasaran dari kebijakan ini adalah "Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN". Melalui sistem kerja baru yang berbasis *squad team*, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
4) Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *SuperApps*-Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah

"Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional" yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain.

5) Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah "Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien". Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja *agile* yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan *talent pool*, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.
6) Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sasaran dari kebijakan ini adalah "Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah". Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran RB dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional.
7) Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services*. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah "Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)", yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.
8) Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*. Sasaran dari kebijakan ini adalah "Meningkatnya Kualitas Pengawasan" yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev tindak lanjut hasil pengawasan

dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

9) Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent*, muara dari pemanfaatan teknologi atau SuperApps adalah penyediaan data secara real time dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah "Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi", yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi.

Selain sembilan kebijakan birokrasi digital tersebut, terdapat kebijakan percepatan lain yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Kebijakan-kebijakan percepatan ini diupayakan agar dapat berjalan secara bersamaan sehingga fokus sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman.

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Kegiatan utama perlu didukung dengan anggaran Pemerintah Daerah. Sehingga perlu menetapkan prioritas kegiatan utama untuk menetapkan kegiatan utama yang perlu segera dilakukan.

Tabel 3.4 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

No.	Sasaran (*Immediate Outcome*)	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
SS.1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel						
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	2	3	15
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai	10	1	3	14

No.	Sasaran (*Immediate Outcome*)	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
	fleksibel bagi pegawai ASN	ASN				
S.3	Terimplementasi kannya Kebijakan Arsitektur SPBE	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	10	3	8	21
S.4	Terimplementasi kannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	7	9	26
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	6	9	25
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	2	3	15
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	4	5	19
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	4	6	20
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	1	1	12
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	2	3	15
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	1	3	14
S.8	Meningkatnya kualitas pengeloalaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	10	3	8	21
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	7	9	26
S.9	Meningkatknya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	6	9	25
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan	10	2	3	15

No.	Sasaran (*Immediate Outcome*)	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
		Aset				
SS.2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	10	3	8	21
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	4	8	22
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-	-	-	-	-
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-	-	-	-	-
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-	-	-	-	-
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	3	7	20
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	10	2	8	20
		Pelaksanaan Core Values ASN	10	1	8	19
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	1	1	12

Adapun target kinerja kegiatan utama RB yang dilaksanakan antara lain :

Tabel 3.5 Target Kinerja Kegiatan Utama RB

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksisting (2022)	Target RPJMD		Target Road Map RB Nasional		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) /	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	90.56%	-	-	90.56%	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksisting (2022)	Target RPJMD		Target Road Map RB Nasional		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
	transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile								
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	-	-	-	-	100 %	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3.31 (Baik)	3.20 (Baik)	3.30 (Baik)	3.40 (Baik)	3.50 (Baik)	Diskominfotik	Seluruh SKPD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan		-	-	93	94	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
		Nilai SAKIP	71.20 (BB)	75.00 (BB)	77.00 (BB)	75.00 (BB)	82.00 (A)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Implementasi pelayanan publik digital	-	-	-	1	-	DPMPTSP	Seluruh SKPD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Jumlah unit kerja yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi	-	-	-	3	4	Inspektorat	Seluruh SKPD
7	Penguatan Implementasi	Tingkat maturitas	3	-	-	3	3	Inspektorat	Seluruh SKPD

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksisting (2022)	Target RPJMD		Target Road Map RB Nasional		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SPIP							
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut Laporan SP4N Lapor	90%	-	-	100 %	100 %	Diskominfotik	Seluruh SKPD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas Eksternal oleh KPK	82.86	-	-	82.92	83.00	Inspektorat	Seluruh SKPD
		Survei Penilaian Integritas Internal oleh KPK	79.84	-	-	79.93	80.00	Inspektorat	Seluruh SKPD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	75	75	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	75	75	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks Pengawasan Kearsipan	48.88	-	-	55	60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh SKPD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2.33	-	-	2.6	2.7	Diskominfotik	Seluruh SKPD
14	Penguatan Pengadaan	Indeks tata Kelola	68.7	-	-	72	73	Bagian PBJ	Seluruh SKPD

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksisting (2022)	Target RPJMD		Target Road Map RB Nasional		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
	Barang dan Jasa Pemerintah	Pengadaan Barang dan Jasa						Sekretariat Daerah	
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD	Seluruh SKPD
		Persentase Temuan BPK yang telah ditindaklanjuti	60%	-	-	75%	90%	BPKPAD	Seluruh SKPD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	-	-	-	175	250	BKD, Diklat	Seluruh SKPD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN								
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN								
19	Penguatan Sistem Merit								
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	62	-	-	75	75	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4.52	-	-	4,75	5	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	69.63	-	-	86.92	90.38	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
		Survey Kepuasan	87.64	87,85	88	89	90	Bagian Organisa	Seluruh SKPD

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksisting (2022)	Target RPJMD		Target Road Map RB Nasional		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
		Masyarakat (SKM)						si Sekretariat Daerah	

3.3. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu :

1) Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
2) Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik

peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual Presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

3.3.1. Penetapan Prioritas Tema RB Tematik

Seperti halnya dengan kegiatan utama pada RB General, tema pada RB Tematik juga perlu dibuatkan skala prioritas untuk menetapkan prioritas tema yang perlu segera dikerjakan.

Tabel 3.6 Penetapan Tema RB Tematik

No.	Target Tahunan	Indikator	Kondisi Eksisting (2022)	Target RPJMD/Renstra		Target Road Map		Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
				2023	2024	2023	2024	Skala 1-10 (1=sangat tidak sesuai ..... 10=sangat sesuai)					
1	Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	4.74%	4.35%	4.32%	4.35%	4.32%	10	8	9	8	8	43
2	Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	3.87	2.00	2.00	2.00	2.00	10	6	7	8	8	39
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)	Indeks SPBE	3.31	3.20	3.30	3.40	3.50	10	6	5	8	8	37
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN)	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	90%	100%	8	5	6	7	8	34
5	Inflasi	Tingkat Inflasi	6.79	3.00-4.00	3.00-4.00	3.00-4.00	3.00-4.00	10	7	8	8	8	41

3.4. Identifikasi Masalah Tema RB Tematik

Setelah menetapkan tema RB Tematik, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah pada tema-tema tersebut. Dalam mengidentifikasi masalah memerlukan kemampuan analisis masalah yang baik, salah satu caranya bisa dilakukan dengan cara membuat fishbone diagram. Diagram ini dinamakan fishbone karena bentuknya yang mirip dengan struktur tulang ikan. Fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisis akar permasalahan dan mengetahui risiko dari suatu hal sejak awal.

A. Kemiskinan

Gambar 3.2 Diagram fishbone dalam penurunan kemiskinan

Tabel 3.7 Skala Potensi Penurunan Angka Kemiskinan

Faktor Penyebab		Banyak/ Sering Terjadi	Dapat Diintervensi	Biaya Rendah	Skala Potensi
Manusia	Kualitas SDM masih rendah	6	7	5	18
	Kuantitas ASN belum memadai	6	6	4	16
	Mindset masyarakat bermental miskin	6	6	2	14
Mesin	Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai keahlian	10	3	5	18
	Sistem informasi kemiskinan belum dimanfaatkan secara maksimal	9	9	7	25
Metode	Keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota	9	8	8	25
	Belum optimalnya Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan	8	9	8	25

Faktor Penyebab		Banyak/ Sering Terjadi	Dapat Diintervensi	Biaya Rendah	Skala Potensi
	Lemahnya pengendalian sektoral terhadap pertumbuhan masyarakat miskin	8	6	6	20
Material	Belum maksimalnya pelayanan rehabilitasi sosial	8	8	4	22
	Belum adanya verifikasi data terkait warga miskin di lapangan	7	8	5	20
	Kepadatan penduduk tidak merata	8	5	4	19
	Kualitas pendidikan tidak merata	9	9	6	24
	Kurangnya pemenuhan infrastruktur dan sanitasi	9	9	3	21
Faktor Lainnya	Kurangnya edukasi terhadap penambahan jumlah anak dalam keluarga	8	6	4	18
	Efek pandemi	6	7	4	17
	Pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang	10	6	8	24

B. Investasi

Gambar 3.3 Diagram fishbone dalam pertumbuhan investasi

Tabel 3.8 Skala Potensi Peningkatan Pertumbuhan Investasi

Faktor Penyebab		Banyak/ Sering Terjadi	Dapat Diintervensi	Biaya Rendah	Skala Potensi
Manusia	Kurangnya SDM pengelola investasi	7	7	4	18
	Kompetensi ASN dalam alur penyampaian LKPM	7	7	7	21
Mesin	Belum adanya filterisasi system (*tagging*)	5	5	5	15
Metode	Belum adanya regulasi daerah terkait keuntungan dalam berinvestasi di wilayah Kota Banjarmasin	9	7	5	21
	Masih panjang nya proses birokrasi dalam perijinan berinvestasi	9	8	5	22
	Belum maksimal terhadap pelaporan LKPM	4	8	5	17
	Belum migrasi OSS	5	7	7	19
Material	Belum optimal pemanfaatkan peta potensi investasi daerah dan promosi daerah	8	7	5	20
	Tidak tersedianya lahan milik Pemerintah Daerah	4	4	4	12
Faktor Lainnya	Kewenanan Pemda <10 M	5	5	5	15
	Pertumbuhan ekonomi dunia yang mempengaruhi ekonomi daerah	3	3	2	8

C. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)

Gambar 3.4 Diagram fishbone tingginya angka stunting

Tabel 3.9 Skala Potensi Penurunan Angka Stunting

Faktor Penyebab		Banyak/ Sering Terjadi	Dapat Diintervensi	Biaya Rendah	Skala Potensi
Manusia	SDM pengelolaan Sistem Informasi Stunting masih belum semuanya memahami	3	4	4	11
Mesin	Belum adanya sistem digitalisasi yang terintegrasi	4	5	2	11
	Sistem geospasial belum maksimal	4	5	2	11
Metode	Kurangnya data yang mendukung pengkuran efektivitas solusi digital	3	3	5	11
	Belum optimalnya koordinasi penanganan stunting terukur antar SKPD	2	3	3	8
Material	Rendahnya pemenuhan fasilitas kesehatan pendukung stunting	4	4	1	9
	Rendahnya pemenuhan infrastruktur pendukung stunting	4	4	1	9
Faktor Lainnya	Tidak adanya dukungan atau norma sosial yang mendorong penggunaan solusi digital	1	1	5	7
	Rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap teknologi dalam konteks Kesehatan anak	3	2	4	9
	Ketidaktahuan manfaat teknologi terhadap kesehatan anak	3	2	4	9

D. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

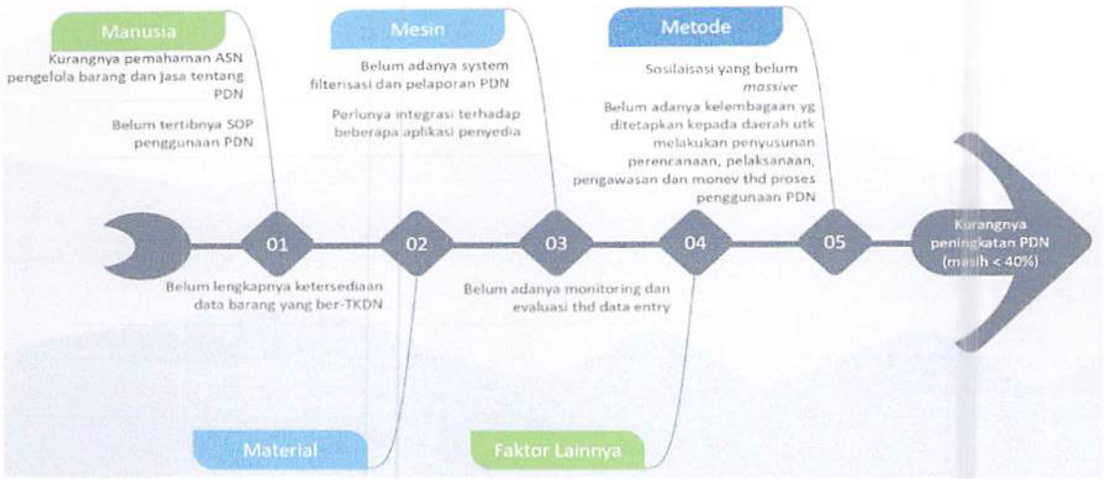

Gambar 3.5 Diagram fishbone rendahnya penggunaan PDN

Tabel 3.10 Skala Potensi Penggunaan PDN

Faktor Penyebab		Banyak/ Sering Terjadi	Dapat Diintervensi	Biaya Rendah	Skala Potensi
Manusia	Kurangnya pemahaman ASN dan IKM tentang PDN	8	9	5	22
	Belum tertibnya SOP penggunaan PDN	7	8	8	20
Mesin	Belum adanya system filterisasi dan pelaporan PDN	7	7	7	21
	Perlunya integrasi terhadap beberapa aplikasi penyedia	5	8	5	18
Metode	Sosialisasi yang belum *massive*	8	8	8	24
	Belum adanya kelembagaan yang tetapkan oleh kepala daerah untuk melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring evaluasi terhadap proses penggunaan PDN	8	8	8	24
Material	Belum lengkapnya ketersediaan data barang yang ber-TKDN	7	4	6	17
Faktor Lainnya	Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap data *entry*	5	6	8	19

E. Inflasi

Gambar 3.6 Diagram fishbone penyebab tingginya angka inflasi

Tabel 3.11 Skala Potensi Tingginya Angka Inflasi

Faktor Penyebab		Banyak/ Sering Terjadi	Dapat Diintervensi	Biaya Rendah	Skala Potensi
Manusia	Kurangnya SDM pengelola yang focus terkait inflasi	6	8	5	18
Mesin	Pemanfaatan si Bapok belum optimal	9	8	5	22
	Belum adanya *early warning system* yang mendeteksi kenaikan angka inflasi	9	8	5	22
Metode	Belum optimalnya SOP pengendalian dan pengelolaan inflasi	7	6	7	20
	Lemahnya koordinasi dan pengawasan inflasi	6	7	5	18
Material	Belum tersedianya pergudangan untuk ketahanan pangan	9	8	4	21
	Fluktuasi harga bahan pangan yang berubah dengan cepat	8	8	7	23
Faktor Lainnya	Kecenderungan masyarakat yang belum menerapkan diservikasi bahan pangan	9	8	6	23
	Pertumbuhan ekonomi dunia yang mempengaruhi	8	2	3	13

Faktor Penyebab		Banyak/ Sering Terjadi	Dapat Diintervensi	Biaya Rendah	Skala Potensi
	ekonomi daerah				
	Perubahan iklim dan cuaca ekstrem	9	3	5	17

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Terdapat 5 (lima) tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu :

1) Menetapkan *Road Map* RB

   Menetapkan *Road Map* RB adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan RB setiap Pemerintah Daerah. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* RB Pemerintah Daerah antara lain :

   a. Isu strategis terkait tata kelola pemerintah;
   b. Capaian RB;
   c. Tujuan dan sasaran strategis RB;
   d. Strategi dan program RB baik general maupun tematik; dan
   e. Manajemen/pengelolaan RB.

2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB

   Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB instansi. Rencana aksi minimal berisi :

   a. Rincian kegiatan;
   b. Indikator output dari rincian kegiatan;
   c. Target;
   d. Waktu pelaksanaan;
   e. Penanggung jawab.

3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi

   Mengelola pelaksanaan rencana aksi yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditentukan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut.

4) Monitoring dan evaluasi RB

   Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk :

a. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
b. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
c. Menilai kualitas pengelolaan RB internal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan, yang dilakukan secara internal oleh masing-masing pemerintah daerah.

5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

4.2. Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan RB General dan Tematik

Penetapan strategi pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah pengampu dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Untuk mengoperasionalkan strategi pelaksanaan RB general dan tematik tersebut yaitu dengan menyusun rencana aksi.

4.2.1. Rencana Aksi RB General

Tabel 4.1 Rencana Aksi RB General

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
SS. 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel																				
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	90.56 %	90.56 %	-	Penyusunan Kebutuhan Jabatan pada Peta Jabatan berdasarkan Anjab dan ABK dan Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional dari masing-masing Instansi Pembina	Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Jabatan pada 32 Perangkat Daerah	5	20	5	2	32	0	0	0	0	0	Rp -	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	n/a	-	100%	Tersedianya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel bagi pegawai ASN	Dokumen	Jumlah kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel bekerja pegawai	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Rp -	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
					Melaksanakan internalisasi kebijakan sistem kerja baru	Jumlah	Jumlah SKPD yang dilakukan internalisasi	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Melaksanakan penyesuaian prosea bisnis dengan sistem kerja baru	Dokumen	Jumlah Proses Bisnis yang disesuaikan	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32			
					Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan sistem kerja baru	Dokumen	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi sistem kerja baru	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeka SPBE	3.31 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	Pembuatan SK Wali Kota tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Dokumen	SK Wali Kota tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	Rp -	Diskominfotik	Seluruh SKPD
					Sosialisasi tentang Arsitektur SPBE	Kegiatan	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi tentang Arsitektur SPBE	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Rp 19,600,000	Diskominfotik	Seluruh SKPD
					Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	Rp 11,000,000	Diskominfotik	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	Rp 5,460,000		
					Sosialisasi tentang Peta Rencana SPBE	Kegiatan	Sosialisasi tentang Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Rp 19,600,000		
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	n/a	93	94	Pengembangan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning	Aplikasi	Jumlah aplikasi yang di manfaatakn dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	3	0	0	0	3	4	0	0	0	4	Rp 56,737,600	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
					Melakukan asistensi untuk Peningkatan konsistensi RPJPD-RPJMD-Renstra PD-RKPD dan Renja PD	Kegiatan	Jumlah Berita Acara hasil asistensi yang di tindak lanjuti	0	0	0	32	32	0	32	0	0	32	Rp 24,750,000		
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan	Jumlah usulan penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat di akomodir SKPD pengampu	0	100	0	0	100	0	150	0	0	150	Rp 313,580,000		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Melaksanakan Bimtek perencanaan kepada SDM yang menangani perencanaan di SKPD	Kegiatan	Jumlah ASN di bidang perencanaan ikut diklat	0	63	0	0	63	0	63	0	0	63	Rp 252,014,900		
	Nilai SAKIP	71.20 (BB)	75 (BB)	82 (A)	Membentuk Tim Uji kualitas/Verifikasi perencanaan kinerja SKPD	SK	Tersusunnya SK terkait Tim uji / verifikasi	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
					Reviu dan Asistensi Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen yang di revisi sesuai hasil asistensi	0	0	0	32	32	0	32	0	0	32	Rp 24,750,000		
					Melaksanakan Bimtek perencanaan kepada SDM yang menangani perencanaan di SKPD	Orang	Jumlah ASN di bidang perencanaan ikut diklat	0	63	0	0	63	0	63	0	0	63	Rp 252,014,900		
					Melaksanakan pengembangan sistem perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terintegrasi	Dokumen	Penyusunan proses bisnis	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Rp -	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
						Kegiatan	Pengembangan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
						Kegiatan	Sosialisasi dan implementasi sistem	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1			
					Melaksanakan peningkatan kompetensi penyusun laporan kinerja	Kegiatan	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Rp 50,000,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
					Melaksanakan Peningkatan kompetensi evaluator internal	Kegiatan	Jumlah kegiatan peingkatan kompetensi evaluator	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Rp 100,000,000	Inspektorat	Inspektorat
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Implementasi pelayanan publik digital	0	1	1	Menyediakan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi antar dinas teknis	Program	Ketersediaan program aplikasi yang memudahkan proses pelayanan publik	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	Rp 17,000,000	Diskominfotik	Seluruh SKPD
																		Rp 60,500,000	DPMPTSP	Diskominfotik
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Jumlah unit kerja yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi	2	3	4	Melakukan pendampingan ke SKPD yang diusulkan sebagai SKPD menuju WBK/WBBM	Laporan	Laporan Pendampingan ZI	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	Rp 40,000,000	Inspektorat	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
						SK	SK Tim Pendampingan ZI	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Rp -	Inspektorat	SKPD Terkait
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	3	3	3	Membangun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua SKPD	Laporan	Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP, Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	Rp 56,511,000	Inspektorat	Seluruh SKPD
						SK	SK Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Banjarmasin	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
						SE	Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahunan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut Laporan SP4N Lapor	90%	100%	100%	Sosaliasasi di SP4N-LAPOR kelurahan dan sekolah, Bamara (Badapatan Menyambung Silaturahmi) ke kampus dan Bimtek Bagi Admin Lapor SKPD	Program	Jumlah program kegiatan yang diintegrasikan	3	2	1	5	11	2	2	2	5	11	Rp 840,345,760	Diskominfotik	Seluruh SKPD
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas Eksternal oleh KPK	82,86	82,92	83,00	Sosialisasi Survei Penilaian Integritas	Laporan	Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	Rp 19,500,000	Inspektorat	Seluruh SKPD
	Survei Penilaian Integritas Internal oleh KPK	79,84	79,93	80,00																
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	75	75	Pembentukan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Jumlah	Jumlah Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	Rp 1,131,000,000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Identifikasi Produk Hukum yang Diukur Berdasarkan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Jumlah	Jumlah Produk Hukum yang Diukur Berdasarkan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	Perda 1 Perwali 1	-	Perda 1 Perwali 1	-	-	Perda 1 Perwali 1	-	Perda 1 Perwali 1			
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	75	75	Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah dengan Instansi yang Berwenang	Jumlah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dengan Instansi yang Berwenang	1	2	2	2	7	1	2	2	2	7	Rp -	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
					Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafter) yang berkualitas	Jumlah	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafter) yang ditugaskan mengikuti pelatihan/bimtek	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2			
					Melaksanakan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Telah Selesai Dievaluasi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Perda 10 Perwali 20	Perda 10 Perwali 20	Perda 10 Perwali 20	Perda 10 Perwali 20	Perda 40 Perwali 80	Perda 10 Perwali 20	Perda 10 Perwali 20	Perda 10 Perwali 20	Perda 10 Perwali 20	Perda 40 Perwali 80			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Melaksanakan Pengelolaan JDIH yang sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum	Persen	Persentase terkelolanya JDIH yang sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks Pengawas Kearsipan	48.88	55	60	Melaksanakan Alih Media dari Konvensional V ke Digital	Berkas	Jumlah Data yang telah dialihkan ke digital	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Rp -	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Seluruh SKPD
					Kebijakan kearsipan	Jumlah	Jumlah kebijakan kearsipan yang telah dikeluarkan	3	3	0	0	6	0	0	0	0	0	Rp 894,767,960		
					Akuisisi arsip SKPD yang sudah dibubarkan atau di merger / dihapuskan	Jumlah	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	0	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	Rp 116,533,800		
					Pendampingan penataan arsip inaktif	Persen	Persentase pelayanan arsip inaktif kepada SKPD	25%	25%	25%	25%	100 %	25%	25%	25%	25%	100 %	Rp -		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Peningkatan kompetensi SDM arsiparis	Orang	Jumlah arsiparis yang ditingkatkan kompetensinya	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	Rp -		
					Melaksanakan bimtek dan sosialisasi pengelolaan kearsipan	Unit Kerja	Jumlah SKPD yang telah mengikuti bimtek dan sosialisasi pengelolaan kearsipan	0	0	35	0	35	0	0	35	0	35	Rp -		
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2.33 (Cukup)	2.6 (Baik)	2.7 (Baik)	Pembuatan SK Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	Dokumen	SK Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	Rp -	Diskominfotik	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Rapat dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan	Jumlah Terlaksananya Rapat dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	1	2	0	4	1	1	1	0	3	Rp 27,800,000		
					Bimtek Satu Data dan Statistik Sektoral	Kegiatan	Jumlah Terlaksananya Bimtek Satu Data dan Statistik Sektoral	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	Rp 25,750,000		
					Pembuatan Dokumen Data	Dokumen	Jumlah Pembuatan Dokumen Data	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	Rp 47,978,500		
					Terselenggaranya forum satu data	Kegiatan	Forum satu data tingkat daerah	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Rp 58,200,000	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	68.7	72	73	Melaksanakan Sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku Pengadaan	Kali	Jumlah sosialisasi PBJ	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	Rp 30,911,400	Bagian PBJ Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
					Melakukan Pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan teknis kepada SDM PBJ	Orang	Jumlah SDM PBJ yang dididik dan dilatih	0	4	10	7	21	0	5	5	8	18	Rp 133,000,000		
					Pemenuhan data dukung pada 9 variabel tingkat kematangan UKPBJ	Jumlah	Jumlah variabel tingkat kematangan UKPBJ	0	0	0	9	9	0	0	0	9	9	Rp 9,970,000		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Peningkatan Pengetahuan SDM dalam penyusunan laporan Keuangan	Dokumen	Laporan Keuangan	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	Rp 974,699,200	BPKPAD	Seluruh SKPD
					Pengimplementasian Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan	Aplikasi	Jumlah modul aplikasi yang dimanfaatkan dalam penatausahaan keuangan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Rp 12,405,000		
					Pengimplementasian aplikasi SIPD Akuntansi dan Pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan	Aplikasi	Modul aplikasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan laporan keuangan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Rp 329,439,600		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
	Persentase Temuan BPK yang telah ditindaklanjuti	60%	75%	90%	Melaksanakan Sosialisasi Akuntansi Keuangan Daerah kepada PPK SKPD sehingga memiliki pengetahuan dalam pemilihan kode belanja pada saat proses awal pengadaan barang dan jasa serta memiliki pengetahuan dalam verifikasi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	Rp 645,259,800	BPKPAD	Seluruh SKPD
					Rekonsiliasi data Laporan Keuangan SKPD	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	Rp 329,439,400		
					Melaksanakan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Laporan	Jumlah Laporan	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	Rp 60,000,000	Inspektorat	Inspektorat

SS. 2 : Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	-	175	250	Peningkatan kompetensi JF melalui Diklat Fungsional maupun Teknis	Persen	Persentasi JF yang mengikuti pelatihan	5%	10%	5%	5%	25%	30%	10%	5%	5%	50%	Rp 721,039,000	BKD, Diklat	Seluruh SKPD
Penguatan Manajemen Talenta ASN					Pelaksanaan asesmen potensi/kompetensi PNS dalam rangka penyusunan profil ASN	Orang	Jumlah PNS yang mengikuti asesmen potensi/kompetensi	813	47	0	0	860	0	1200	0	0	1200	Rp 966,040,000		
					Membangun sistem informasi yang memuat profil ASN dan *Talent Pool* (9 kotak talenta)	Aplikasi/ program	Sistem Informasi Manajemen Talenta	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Rp -		
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN					Melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi	3	5	4	3	15	2	4	4	2	12	Rp 200,000,000		
					Melaksanakan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Orang	Jumlah ASN tugas belajar	0	25	20	0	45	0	25	20	0	45	Rp 743,296,800		
					Melaksanakan pengelolaan Diklat	Persen	Persentase peserta Diklat yang lulus	10%	40%	35%	15%	100 %	10%	40%	35%	15%	100 %	Rp 4,673,366,200		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Melaksanakan penyusunan dan asistensi penilaian kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen penyusunan dan asistensi penilaian kinerja ASN	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Rp 165,000,000		
					Melaksanakan Rapat MPPHDP, monitoring dan sosialisasi	Kali	Jumlah monitoring, jumlah Rapat MPPHDP, jumlah sosialisasi	3	6	6	4	19	3	6	6	4	19	Rp -		
					Melaksanakan mediasi proses izin perceraian pegawai	Kali	Jumlah penyelesaian izin cerai	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	Rp -		
Penguatan Sistem Merit					Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan ASN	Kali	Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN yang sudah ditetapkan PPK	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	Rp 8,820,000		
					Melaksanakan Pengadaan ASN	Kali	Jumlah pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	Rp 689,410,000		
					Melaksanakan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Kali	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Rp 27,888,000		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Melaksanakan Pengembangan Karier ASN	Dokumen / Perwali	Ketersediaan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan untuk JPT, JA dan JF	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Rp -		
					Menyusun profil pegawai	Orang	Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi	81	200	350	281	912	150	100	132	0	382	Rp -		
					Menyusun rencana suksesi berdasarkan pola karier	Kali	Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Rp -		
					Menganalisa kesenjangan kualifikasi dan kompetensi untuk JPT dan JA	Kali	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	Rp -		
					Menganalisa kesenjangan kinerja	Kali	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Rp -		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN tahun 2023-2027 (rencana 5 tahunan)	Dokumen	Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Rp -		
					Menyusun analisis kebutuhan diklat untuk memenuhi kewajiban 20 JP per tahun	Kali	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat tahunan dalam upaya pemenuhan kewajiban 20 jp per tahun	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	Rp -		
					Melaksanakan pelatihan coaching dan mentoring bagi pejabat Administrator, Pengawas, JFT dan Pelaksana senior	Kali	Jumlah pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	Rp -		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Melaksanakan tes PNS Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Kali	Jumlah pelaksanaan tes PNS Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	Rp 933,590,000		
					Melaksanakan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi secara terbuka dan kompetitif	Kali	Jumlah pelaksanaan pelantikan dalam rangka pengisian JPT, Jabatan Administrasi	1	1	2	2	6	2	1	1	2	6	Rp 933,590,000		
					Menyusun kontrak kinerja untuk seluruh pegawai	Kali	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penyusunan kinerja pegawai	1	2	2	1	6	2	1	1	1	5	Rp 165,000,000		
					Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja dan tercapainya kontrak kinerja	Kali	Jumlah pelaksanaan kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja dan tercapainya kontrak kinerja	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	Rp -		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Menyusun Peraturan Walikota tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Kali	Ketersediaan Peraturan Walikota tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	Rp 165,000,000		
					Melaksanakan penegakan disiplin ASN	Kali	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan disiplin ASN	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	Rp -		
					Melaksanakan tes bebas narkoba untuk ASN	Kali	Jumlah pelaksanaan tes bebas narkoba untuk ASN	0	3	2	0	5	0	2	2	2	6	Rp -		
					Melaksanakan pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	Kali	Ketersediaan data yang mutakhir terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	Rp -		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Menyediakan fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi	Kali	Ketersediaan aplikasi untuk pelayanan kepegawaian (pengajuan pangkat, pensiun, cuti, gaji berkala, presensi online, tambahan penghasilan pegawai, SLKS, dll)	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	Rp 120,000,000		
					Melaksanakan pembangunan sistem informasi kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan kepegawaian	Kali	Ketersediaan aplikasi SIMPEG berbasis online yang dibangun secara bertahap untuk dapat memberikan pelayanan kepegawaian	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	Rp 250,000,000		
					Menyediakan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	Kali	Ketersediaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	Rp 250,000,000		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan *Core Values* ASN	Indeks BerAKHLAK	62	75	75	Melaksanakan internalisasi *Core Values* ASN Berakhlak	Persen	Persentase Unit kerja yang mempublikasikan *core values* ASN	0	0	0	100 %	100 %	0	0	0	100 %	100 %	Rp 20,000,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4.52	4.75	5	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja pelayanan publik	Kali	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja pelayanan publik	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	Rp 199,254,800	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
					Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Kali	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3			
					Melaksanakan sosialisasi kinerja pelayanan publik	Kali	Melaksanakan sosialisasi kinerja pelayanan publik	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	69.63	86.92	90.38	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan asistensi dalam rangka evaluasi nilai kepatuhan SKPD	Kali	Jumlah Rapat Koordinasi dan asistensi dalam rangka evaluasi nilai kepatuhan SKPD	0	7	0	0	7	0	7	0	0	7	Rp 199,254,800	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
					Melaksanakan *coaching clinic handling complaint* bagi petugas pengelola pengaduan pada SKPD	Kali	Jumlah *coaching clinic handling complaint* bagi petugas pengelola pengaduan pada SKPD	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai persiapan penilaian kepatuhan	Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi sebagai persiapan penilaian kepatuhan	0	7	0	0	7	0	7	0	0	7			
					Melaksanakan *Workshop* Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pemberi layanan pada SKPD	Kali	Jumlah *Workshop* Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pemberi layanan pada SKPD	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2			
					Melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik (*public hearing*) standar pelayanan	Kali	Jumlah kegiatan forum konsultasi publik (*public hearing*) standar pelayanan	0	2	0	0	2	0	1	1	0	2			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87.64	89	90	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja SKM	Kali	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja SKM	2	0	0	1	3	1	1	1	1	4	Rp 84,068,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
					Melaksanaka monitoring dan evaluasi kinerja SKM	Kali	Melaksanaka monitoring dan evaluasi kinerja SKM	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2			
					Melaksanakan sosialisasi kinerja SKM	Kali	Melaksanakan sosialisasi kinerja SKM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			

4.2.2. Rencana Aksi RB Tematik

Tabel 4.2 Rencana Aksi RB Tematik

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Target Penyelesaian 2024					Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024		Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koordinator	Pelaksana
1. Pengentasan Kemiskinan																						
Terbatasnya kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin	Menurunkan kawasan kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	20%	20%	25%	Menurunkan rumah tidak layak huni	Unit	Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni	0	0	0	38	38	0	0	0	0	0	Terkait	Rp 95,000,000	Dinsos	DPRKP
						Kemudahan warga miskin untuk mendapat akses air bersih dan tarif yang terjangkau	Rumah	Jumlah rumah warga miskin yang mendapat akses air bersih	67744	67156	66568	65981	267449	0	0	0	0	0	Terkait	Rp -	DPUPR	PT. Air Minum Bandarmasih

	Menurunnya penduduk miskin	Angka kemiskinan	4.74	4.35	4.32	Membuat MoU dengan lembaga sosial berbadan hukum untuk bekerja sama dalam pengentasan kemiskinan	MoU	Jumlah MoU yang disepakati bersama	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Terkait	Rp -	Bag. Kesra	Seluruh SKPD
						Menerbitkan SE Wali Kota tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada instansi-instansi diluar Pemerintah Kota Banjarmasin	SE	Jumlah SE yang diterbitkan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Terkait	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh instansi terkait
						Menerbitkan instruksi Wali Kota tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk internal Pemerintah Kota Banjarmasin	Instruksi	Jumlah surat instruksi Wali Kota yang diterbitkan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Tidak Terkait	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh SKPD

Rendahnya kualitas dan keterpaduan database	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang terpadu	1 data terpadu by name by address by NIK	100%	100 %	100 %	Rekonsiliasi data penduduk miskin dan pemutakhiran data sasaran	Persen	% data penduduk miskin yang telah dimutakhirkan	100 %	0	0	0	100 %	100 %	0	0	0	100 %	Terkait	Rp 338,479,480	Dinas Sosial	SKPD Terkait
						Melakukan profiling penduduk miskin dengan memanfaatkan data dari K/L teknis	Persen	% penduduk miskin yang di-profiling	0	0	0	100 %	100 %	0	0	0	100 %	100 %	Terkait	Rp 47,880,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
						Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sasaran	Persen	% data sasaran yang telah dilakukan verifikasi dan validasi	100 %	0	0	0	100 %	100 %	0	0	0	100 %	Terkait	Rp 600,700,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
						Melakukan monitoring dan evaluasi data warga miskin	Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring evaluasi data warga miskin	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	Terkait	Rp 32,175,000	Bappedalitbang	

Untuk usulan bantuan sudah harus diinput H-1, sehingga ada bantuan yang belum bisa diakomodir.	Masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni dan termasuk dalam data DTKS.	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	100%	100 %	100 %	Terpenuhinya tempat tinggal yang layak sesuai standar keamanan, kesehatan dan sosial	KPM	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan RS-Rutilahu	0	46	0	0	46	0	26	0	0	26	Terkait	Rp 1,150,000,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
Banyaknya usulan permintaan Rasko dari kelurahan	Masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan BPNT, PKH dan termasuk dalam data DTKS.	Persentase KPM yang mendapatkan bantuan BPNT dan PKH sosial bersyarat	100%	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pangan warga kurang mampu	KPM	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT sosial bersyarat	15899	29776	0	0	45675	15899	29776	0	0	45675	Terkait	Rp 4,370,880,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
								Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan PKH sosial bersyarat	15899	15602	16000	16000	63501	16000	16000	16000	16000	64000	Terkait		Dinas Sosial	SKPD Terkait
Kurangnya jejaring pemasaran hasil usaha	Masyarakat miskin yang mempunyai embrio usaha dan termasuk dalam data DTKS.	Persentase wira usaha binaan dinas sosial yang mandiri	100%	100 %	100 %	Terasahnya keterampilan berusaha untuk membantu meningkatkan taraf hidup/ kesejahteraan keluarga	KPM	Jumlah KPM yang mendapatkan pembinaan	0	0	0	30	30	0	30	0	0	30	Terkait	Rp 500,000,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait

Banyaknya usulan permintaan Permakanan dari LKSA	Anak Terlantar yang tidak menerima permakanan	Persentase LKSA yang mendapat bantuan permakanan	100%	100 %	100 %	Tersediaanya permakanan Anak Terlantar	anak	Jumlah LKSA yang mendapatkan permakanan	31	31	31	31	124	32	32	32	32	128	Terkait	Rp 660,511,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
Banyaknya usulan permintaan sandang untuk anak terlantar Binaan LKSA yang berada di luar panti	Anak Terlantar yang tidak mendapatkan sandang yang layak	Persentase AT yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak	100%	100 %	100 %	Tersedianya Sandang untuk Anak Terlantar	KPM	Jumlah KPM yang berada di luar Panti yang mendapatkan permakanan	0	0	105	0	105	0	0	120	0	120	Terkait	Rp 51,429,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
Banyaknya ODGJ Terlantar yang memerlukan permakanan secara layak	ODGJ Terlantar yang mendapatkan permakanan	Persentase ODGJ yang mendapatkan permakanan secara layak	100%	100 %	100 %	Tersedianya permakanan untuk ODGJ di Rumah Singgah	orang	Jumlah ODGJ yang terlantar yang berada di Rumah Singgah	60	60	60	60	240	70	70	70	70	280	Terkait	Rp 831,633,600	Dinas Sosial	SKPD Terkait
Banyaknya usulan permintaan permakan an untuk Lansia Terlantar dan Disabilitas Terlantar	Lansia Terlantar dan Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan	Persentase Lansia Terlantar, Disabilitas, Gepeng dan Anak TerlantarTerlantar yang mendapatkan permakanan secara layak	100%	100 %	100 %	Tersedianya Permakanan Untuk Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar	orang	Jumlah Lansia Terlantar, Disabilitas, Gepeng dan Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan	0	50	420	50	520	0	50	420	50	520	Terkait	Rp 165,312,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait

Banyaknya warga miskin yang putus sekolah	Meningkatkan rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	9.98-9.99	9.98 - 9.99	9.99 - 10.01	Meningkatkan partisipasi peserta pendidikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas	Perda	Perda Disabilitas Nomor 3 Tahun 2022	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Terkait	Rp -	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan
Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan masih belum terpadu lintas sektor dan instansi	Meningkatnya alokasi penganggaran untuk pengentaan kemiskinan	Mandatory anggaran terkait pengentasan kemiskinan				Membuat kebijakan terkait percepatan penanggulangan kemiskinan	Kebijakan	Perwali Kota Banjarmasin penanggulangan kemiskinan terpadu	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Terkait	Rp 248,691,900	Bappedalitbang	SKPD Terkait
						Menyusun rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan	Rencana aksi	Tersusunnya rencana aksi tahunan terkait penanggulangan kemiskinan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Terkait			
						Membentuk tim penanggulangan kemiskinan	SK	SK Tim Penanggulangan Kemiskinan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Tidak Terkait			

	Terwujudnya peta proses bisnis yang terpadu	Tersedia probis terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam peningkatan kompetensi teknis dan manajerial SDMA pengentasan kemiskinan	Orang	Jumlah SDM terkait pengentasan kemiskinan yang mengikuti Diklat Penyusunan Proses Bisnis Pengentasan Kemiskinan	0	0	0	2	2	0	2	0	0	2	Tidak Terkait	Rp 39,248,000	BKD Diklat	SKPD Terkait
2. Peningkatan Investasi																					
Rendahnya kemampuan Pemda dalam mengidentifikasi dan menjual potensi investasi daerah	Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Mengidentifikasi dan Memasarkan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Peta Pontensi Investasi Daerah yang diupdate dan tersedia di website DPMPTSP dan Pemerintah Daerah	Database	1	1	Tersedianya peta potensi investasi yang faktual dan mudah diakses	Dokumen	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Berusaha Kota Banjarmasin	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Terkait	Rp 55,000,000	DPMPTSP	DPMPTSP, Diskominfo, Bappedalitbang, DKP3, Disperdagin, Kecamatan / Kelurahan
							SDM	Jumlah SDM Kompeten yang melaksanakan pemetaan peta potensi investasi daerah	0	0	0	7	7	0	0	0	7	7	Tidak Terkait		DPMPTSP	Tenaga Ahli (Perguruan Tinggi)

		Persentase investor yang berkomiten untuk melakukan investasi	6%	3	5	pameran promosi potensi investasi, forum bisnis, FGD strategi promosi	Jumlah	Form profil Minat Penanaman Modal	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	Tidak Terkait	Rp 317,167,200	DPMPTSP	DPMPTSP
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkanya Realisasi investasi daerah	1.154 Trilyun	1.154 Trilyun	1.176 Trilyun	Penyusunan perda insentif penanaman modal	Jumlah perda	jumlah tersusunnya perda insentif penanaman modal	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Terkait	Rp -	DPRD/Bagian Hukum/SKPD teknis	DPRD/Bagian Hukum
						Terlaksananya Pegendalian Penanaman Modal	Kegiatan	Pemantauan Penanaman Modal	0	0	2	1	3	0	2	1	0	3	Tidak Terkait	Rp 50,000,000	DPMPTSP	SKPD Teknis / pemegang hak akses turunan
								Pembinaan Penanaman Modal	0	4	7	2	13	0	4	7	2	13	Tidak Terkait	Rp 377,027,900	DPMPTSP	SKPD Teknis / pemegang hak akses turunan
								Pengawasan Penanaman Modal	10	10	10	10	40	10	10	10	10	40	Tidak Terkait	Rp 190,371,700	DPMPTSP	SKPD Teknis / pemegang hak akses turunan

Rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Hasil Penilaian Mandiri Kinerja PTSP	100%	100 %	100 %	Meningkatkan Kepatuhan Pemenuhan Kriteria Penilaian Kinerja Layanan Investasi (Pemenuhan Kriteria Berdasarkan Permen Investasi/Kepala BKPM No. 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan K/L.	Persentase	Pemenuhan kriteria kinerja PTSP	0	0	0	100 %	100 %	0	0	0	100 %	100 %	Tidak Terkait	Rp 271,675,000	DPMP TSP	SETDA, DPMPTSP, BKD Diklat, SKPD TEKNIS TERKAIT PPB
		Hasil Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda	%	17,8			Persentase	Pemenuhan kriteria kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	0	17,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Terkait		DPMP TSP	SETDA, DPMPTSP, BKD Diklat, SKPD TEKNIS TERKAIT PPB
		Ketepatan waktu layanan (Bidang Pa Faidillah)	%	100 %	100 %	Meningkatkan Hasil Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	Laporan	Laporan monitoring dan evaluasi ketepatan waktu layanan	0	0	0	100 %	100 %	0	0	0	100 %	100 %	Tidak Terkait		DPMP TSP	SETDA, DPMPTSP, DISKOMINFO, SKPD TEKNIS TERKAIT PPB, INSPEKTORAT

							SOP	revisi SOP Pelayanan perijinan	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	Tidak Terkait		DPMP TSP	SKPD Terkait
		Survei Persepsi Anti Korupsi (Bidang Ibu Rahmi)	Skor	3.9	3.95	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Skor	Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	0	3.9	0	0	3.9	0	3.95	0	0	3.95	Tidak Terkait		DPMP TSP	SETDA, DPMP TSP, DISKOMINFO, SKPD TEKNIS TERKAIT PPB, INSPEKTORAT
		Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	90.26	90.50		Laporan	Laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	Terkait		DPMP TSP	SKPD Terkait
Rendahnya Kepatuhan Pelaporan LKPM	Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kepatuhan Pelaporan LKPM	%	100 %	100 %	Melaksanakan Pengawasan Kepada Pelaku Usaha	Laporan	Jumlah Pelaku Usaha yang di lakukan pengawasan	6	7	8	5	26	6	7	8	5	26	Tidak Terkait	Rp 464,339,280	DPMP TSP	DPMP TSP
				100 %	100 %	Melakukan Pembinaan kepada Pelaku Usaha melalui kegiatan Bimbingan Teknis / Sosialisasi	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	0	5	5	0	10	0	5	5	0	10	Terkait		DPMP TSP	DPMP TSP dengan Pelaku Usaha

				100 %	100 %	Meningkatkan Ketepatan Informasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan	Evaluasi, verifikasi penyampaian LKPM dari Pelaku Usaha Kecil-Menengah	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	Tidak Terkait		DPMPTSP	DPMPTSP, Pelaku Usaha
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting)																							
Belum adanya sistem informasi Stunting	Tersedianya sistem informasi Stunting	Jumlah sistem informasi Stunting	1	-	1	Koordinasi dengan tim penanganan Stunting	Kegiatan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan tim penanganan Stunting terkait sistem informasi Stunting	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	Tidak Terkait	Rp -	Diskominfotik	Dinas Kesehatan, DPPKBPM
						Pembuatan proses bisnis sistem informasi Stunting	Dokumen	Jumlah dokumen proses bisnis sistem informasi Stunting	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	Tidak Terkait	Rp -		Dinas Kesehatan, DPPKBPM
						Pembuatan sistem informasi Stunting	Aplikasi	Jumlah aplikasi sistem informasi Stunting	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	Tidak Terkait	Rp -		Dinas Kesehatan, DPPKBPM
						Sosialisasi mengenai sistem informasi Stunting	Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi mengenai sistem informasi Stunting	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Tidak Terkait	Rp 3,300,000		Dinas Kesehatan, DPPKBPM, Kecamatan dan Kelurahan

Masih kurangnya pengelolaan data stunting	Meningkatnya pelatihan pengelolaan data penderita stunting	Cakupan keterisian data aplikasi stunting	75%	75%	100 %	Melaksanakan pelatihan pengelolaan data/ sistem informasi stunting	Kegiatan	Jumlah pelatihan pengelolaan data/ sistem informasi stunting	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	Tidak Terkait	Rp 277,458,000	DPPKBPM	SKPD Terkait
Keterbatasan SDM dan Sarana komputer dalam menjalankan Aplikasi e-PPGBM dan E-Kohort	Meningkatnya kualitas ketersediaan data Aplikasi e-PPGBM dan E-Kohort	Cakupan ketersediaan data aplikasi e-PPGBM dan e-Kohort	100%	80%	85%	Mengadakan pelatihan dan Bimtek dalam menjalankan aplikasi	Kegiatan	Terlaksanaanya evaluasi dan monitoring terkait kevalidan data aplikasi e-PPGBM dan E-Kohort	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	Tidak Terkait	Rp 25,000,000	Dinas Kesehatan	SKPD Terkait
Masih terdapatnya lembaga PAUD HI yang belum bekerjasama dengan posyandu, salah satu syarat agar bisa dipilih atau diusulkan sebagai lembaga PAUD HI adalah dengan melakukan kerjasama dengan posyandu	Meningkatnya Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Persentase PAUD yang mengembangkan menjadi PAUD HI	55%	55%	88%	Mengadakan Sosialisasi tentang PAUD HI	Orang	Peserta perwakilan lembaga yang mengikuti sosialisasi	0	0	160	0	160	0	0	160	0	160	Tidak terkait	Rp 44,461,000	Dinas Pendidikan	SKPD Terkait
4. Penggunaan Produk Dalam Negeri																								

SDM PBJ yang kurang Kompeten	Meningkatnya SDM PBJ yang berkompeten	Jumlah SDM PBJ yang meningkatkan kompetensinya	21	21	18	Melakukan Pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis kepada SDM PBJ	Orang	Jumlah SDM PBJ yang dididik dan dilatih	0	4	10	7	21	0	5	5	8	18	Tidak terkait	Rp 133,000,000	UKPBJ	Pegawai UKPBJ
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum matang	Meningkatnya Kematangan organisasi UKPBJ	Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3 atau 9 variabel	Level 3 atau 9 variabel	Level 3 atau 9 variabel	Melakukan pemenuhan data dukung pada 9 variabel tingkat kematangan UKPBJ sebagai syarat level 3	Jumlah	Jumlah variabel tingkat kematangan UKPBJ	0	0	0	9	9	0	9	0	0	9	Tidak terkait	Rp 9,970,000	UKPBJ	UKPBJ
Penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa kurang optimal	Meningkatnya Penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	Skor penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	21	21	25	Melaksanakan Sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku Pengadaan	kali	Jumlah sosialisasi PBJ	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	Terkait	Rp 30,911,400	UKPBJ	UKPBJ dan Pelaku Pengadaan
Belum meratanya informasi mengenai e katalog dan P3DN ke IKM	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan skpd terkait P3DN, PDN ber TKDN dan PDN non TKDN, serta meningkatnya	Jumlah peserta sosialisasi mengenai e-katalog dan P3DN	50	50	100	Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan mengenai e-katalog dan P3DN	Orang	Jumlah peserta sosialisasi dan pendampingan mengenai e katalog dan P3DN	0	0	25	25	50	25	25	25	25	100	Terkait	Rp 31,438,000	Disperdagin	Disperdagin

	jumlah produk dalam negeri Industri Kecil yang bersertifikat TKDN																					
Masih rendahnya pemahaman IKM terkait pemenuhan persyaratan dalam sertifikat TKDN untuk PDN industri	Meningkatnya pemenuhan persyaratan dalam sertifikasi TKDN	Jumlah peserta sosialisasi mengenai pemenuhan persyaratan dalam sertifikat TKDN untuk PDN Industri	50	50	100	Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan mengenai pemenuhan persyaratan dalam sertifikat TKDN untuk PDN Industri	Orang	Jumlah peserta sosialisasi yang memenuhi persyaratan dalam sertifikat TKDN	0	0	25	25	50	25	25	50	0	100	Terkait	Rp 13,200,000	Disperdagin	Disperdagin
Proses sertifikasi yang sulit	Tersedianya fasilitasi sertifikasi	Jumlah fasilitasi sertifikasi dan pendampingan perolehan sertifikat TKDN	50	50	55	Menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi dan pendampingan perolehan sertifikat TKDN	Orang	Jumlah IKM yang menerima fasilitasi sertifikasi dan pendampingan perolehan sertifikat TKDN	0	0	25	25	50	25	25	5	0	55	Terkait	Rp 44,638,000	Disperdagin	Disperdagin

Belum adanya mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	Tersedianya mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	Jumlah mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	1	1	0	Penyusunan mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	kegiatan	Jumlah rapat koordinasi penyusunan mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	Tidak terkait	Rp 2,499,400	Dispердagin	Disperdagin dan seluruh OPD
ASN yang belum kompeten dalam proses pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan	Jumlah ASN yang bersertifikat PBJ		30 org	40 org	Melakukan pelatihan kepada ASN dalam proses pengadaan barang dan jasa	orang	ASN yang dilatih PBJ level 1	0	0	30	0	30	0	0	40	0	40	Tidak terkait	Rp 180,000,000	BKD	BKD Diklat, UKPBJ
				10 org	15 org	ASN yang lulus sertifikasi PBJ	orang	jumlah ASN yang lulus sertifikasi PBJ level 1	0	0	10	0	10	0	0	15	0	15	Tidak terkait		BKD	BKD Diklat, UKPBJ
5. Pengendalian Inflasi																						
Belum optimalnya kualitas Data Harga Bahan Pokok (BAPOK) dan Barang Penting	Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Tahun Ke Tahun	2 - 4 %	2 - 4 %	2 - 4 %	Melakukan pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	Terkait	Rp 70,571,520	Dispердagin	Disperdagin

								Penting																
						Melaksanakan Pasar Murah dan Bazar	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah dan Bazar	14	21	14	10	59	20	6	0	0	26	Terkait	Rp 1,558,624,000	Disperdagin	Disperdagin
						Melakukan Kerjasama antar Daerah dengan Daerah Penghasil Komoditas Bahan Pokok	Dokumen	Jumlah Kerjasama Antar Daerah	1	0	1	0	2	0	1	1	0	2	Tidak terkait	Rp -	TPID	Disperdagin
Biaya Harian Transportasi	Mengurangi Biaya Harian Transportasi	Murahnya Biaya Transportasi				Memberikan Pelayanan Angkutan Trans Banjarmasin dan Angkutan Pelajar Gratis	Unit	Jumlah Armada	0	0	0	38	38	0	0	0	38	38	Terkait	Rp 6,915,072,500	TPID	Dinas Perhubungan
Belum tersedianya pergudangan untuk ketahanan pangan	Ketersediaan Bahan Pangan untuk penanggulangan inflasi	Tingkat Inflasi Tahun Ke Tahun	2 - 4%	2 - 4%	2 - 4%	Melakukan pemantauan harga bahan Pangan	Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok dan Bahan Pangan Lainnya	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	Terkait	Rp 50,000,000	DKP3	DKP3

						Melaksanakan Gerakan Pangan Murah	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah	0	0	10	15	25	0	5	10	10	25	Terkait	Rp 493,757,600	DKP3	DKP3
						Melaksanakan Penyaluran bantuan Beras CPP	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beras CPP	1	2	0	0	3	1	2	0	0	3	Terkait	Rp 29,584,600	DKP3	DKP3
Kecenderungan masy. yang belum menerapkan diversifikasi bahan pangan	Pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	85.5	85.5	86	Bimbingan Teknis Diversifikasi/ Penganekaragaman Olahan Pangan	Kegiatan	Jumlah peserta bimbingan teknis diversifikasi/penganekaragaman olahan pangan	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	Terkait	Rp 11,221,400	DKP3	DKP3
						Melaksanakan Gerakan Menanam Bibit Unggul	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Gerakan Menanam Bibit Unggul	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	Terkait	Rp 10,177,600	DKP3	DKP3
Keterjangkauan pangan baik dari sisi eknonomi maupun fisik	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Rasio cadangan pangan yang dikuasai pemerintah	269	12	15	Cadangan pangan	Ton	Tersedia cadangan pangan pemerintah di Kota Banjarmasin	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	Terkait	Rp 250,000,000	DKP3	DKP3

4.3. Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Tim dimaksud adalah Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perubahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 disebutkan bahwa untuk pelaksana reformasi birokrasi level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara massif dan komprehensif oleh semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah :

1) Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2) Melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di setiap pemerintah daerah serta unit kerja;
3) Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5) Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Adapun susunan tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Susunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
5.	Asisten III Bidang Administrasi Umum	Koordinator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
6.	Inspektur	- Koordinator Pembangunan Zona Integritas - Koordinator Penguatan Implementasi SPIP - Koordinator Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
7.	Kepala Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
8.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	- Koordinator Penataan JabatanFungsional - Koordinator Penguatan Manajemen Talenta ASN - Koordinator Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN - Koordinator Penguatan SistemMerit
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	- Koordinator Pelaksanaan Arsitektur SPBE - Koordinator Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
		- Koordinator Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
10.	Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Koordinator Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital - Koordinator Pelaksanaa Pelayanan Publik Prima
11.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Pelaksanaan Arsip Digital
12.	Kepala Bagian Hukum	- Koordinator Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik - Koordinator Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Koordinator Penguatan Barang dan Jasa Pemerintah
14.	Kepala Bagian Organisasi	- Koordinator Penyederhanaan Struktur Organisasi - Koordinator Pelaksanaan SAKIP - Koordinator Penyusunan Sistem Kerja - Koordinator Pelaksanaan *Core Values* ASN
15.	Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota

Tabel 4.4 Susunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Pengentasan Kemiskinan		
1.	Kepala Dinas Sosial	Koordinator Pelaksanaan Tematik Pengentasan Kemiskinan

2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
3.	Inspektur	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
6.	Camat se-Kota Banjarmasin	Anggota
Peningkatan Investasi		
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator Pelaksanaan Tematik Peningkatan Investasi
2.	Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
3.	Inspektur	Anggota
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator Pelaksanaan Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat	Anggota
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Kepala BKD, Diklat	Anggota
6.	Camat se-Kota Banjarmasin	Anggota
Pengendalian Inflasi		
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Koordinator Pelaksanaan Tematik Pengendalian Inflasi
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
3.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah	Anggota
Penggunaan Produk Dalam Negeri		
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Koordinator Pelaksanaan Tematik Penggunaan PDN

2.	Inspektur	Anggota
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota

4.4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di internal baik pada capaian *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil) dilakukan oleh Inspektorat. Adapun untuk waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara triwulan, dan evaluasi dilakukan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh Inspektorat.